



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG
2024 - 2026**



(0719) 21445, Fax. (0719) 23924



Jalan Sekolah No. 23 Tanjungpandan 33411



dikbud@belitung.go.id, Website: dikbud.belitung.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas Berkat Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, maka dapat diselesaikannya Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Perubahan Kedua Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, diharapkan dapat mengakomodir dan menyesuaikan antara kebijakan pembangunan nasional serta prioritas pembangunan daerah terutama untuk urusan pendidikan dan kebudayaan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Selain itu Perubahan Kedua Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat dijadikan pedoman dan arahan oleh stakeholder di lingkungan pendidikan dan kebudayaan dalam melaksanakan pembangunan Manusia yang cerdas dan berbudaya.

Tanjungpandan, November 2024
KEPALA DINAS,



Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610011995121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 33
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 35
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026	 36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	42
3.5 Isu Strategis.....	43
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 44
4.1 Tujuan dan Sasaran	44
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	45
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 48
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	48
 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 50
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	50
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 62
 BAB VIII PENUTUP	 63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan 16

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan..... 17

Tabel 2.3. Keadaan Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 18

Tabel 2.4. Keadaan Pegawai PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan 18

Tabel 2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor..... 19

Tabel 2.6 Kondisi Aset Tetap 20

Tabel 2.7 Perkembangan Target dan realisasi Pendapatan 3 (Tiga)

 Tahun terakhir 21

Tabel 2.8. Keadaan Siswa 3 (Tiga) Tahun terakhir..... 22

Tabel 2.9. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar

 Tahun 2020 22

Tabel 2.10. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar

 Tahun 2021 23

Tabel 2.11. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar

 Tahun 2022 23

Tabel 2.12. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah

 Pertama Tahun 2020 23

Tabel 2.13. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah

 Pertama Tahun 2021 24

Tabel 2.14. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah

 Pertama Tahun 2022 24

Tabel 2.15. Keadaan Satuan Pendidikan Tahun 2022 per Kecamatan..... 24

Tabel 2.16. Perkembangan Angka Melanjutkan 3 (Tiga) tahun terakhir..... 25

Tabel 2.17. Perkembangan Akreditasi Sekolah Tahun 2022 25

Tabel 2.18. Data Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tahun 2022..... 25

Tabel 2.19. Data Guru yang bersertifikat pendidik tahun 2022 26

Tabel 2.20. Data Perkembangan Seni Budaya 3(Tiga Tahun terakhir 26

Tabel 2.21. Data Benda Cagar Budaya (BCB) dan Objek Diduga Cagar

 Budaya (ODCB) Kabupaten Belitung Tahun 2022 26

Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 Kabupaten Belitung Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator

 Program Tahun 2019 – 2023 29

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas

 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2021 – 2023.. 32

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Pendidikan dan KebudayaanTabel 3.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 35

Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Renstra Kemendikbud 39

Tabel 3.3. Rumusan Tujuan 40

Tabel 3.4 .Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Renstra PD Provinsi 41

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 44

Tabel 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah..... 45

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan..... 49

Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 55

Tabel 7.1. Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026..... 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lain..... 2

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan. Maka dari itu dalam rangka memelihara kesinambungan dan keselarasan proses pembangunan serta melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

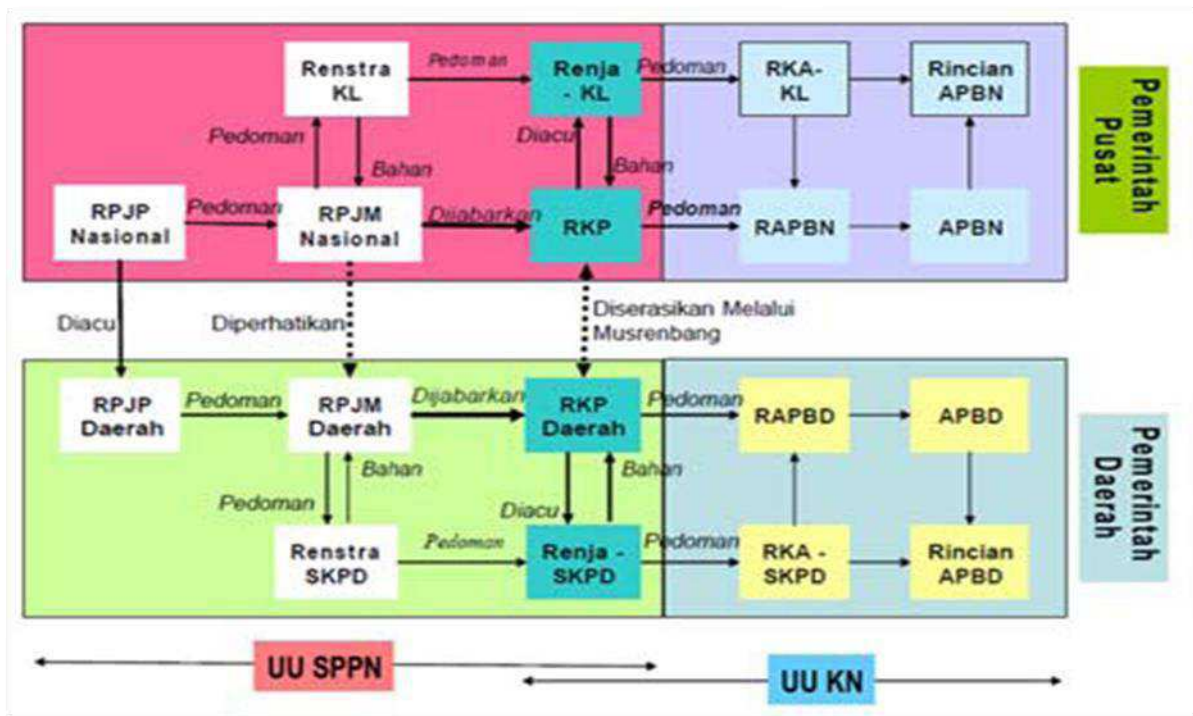
Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung berakhir pada tahun 2023, hal tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunannya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melewati berbagai tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi dan memperhatikan renstra Kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen lain

Rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Renstra Perubahan Kedua Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung 2024 - 2026 , sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
6. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24)lengkapi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah untuk:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka membentuk generasi yang cerdas dan berbudaya.



- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Belitung.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- e. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung adalah:

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sesuai dengan Kewenangan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah Tahun 2014-2034, dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah, Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mempunyai fungsi :

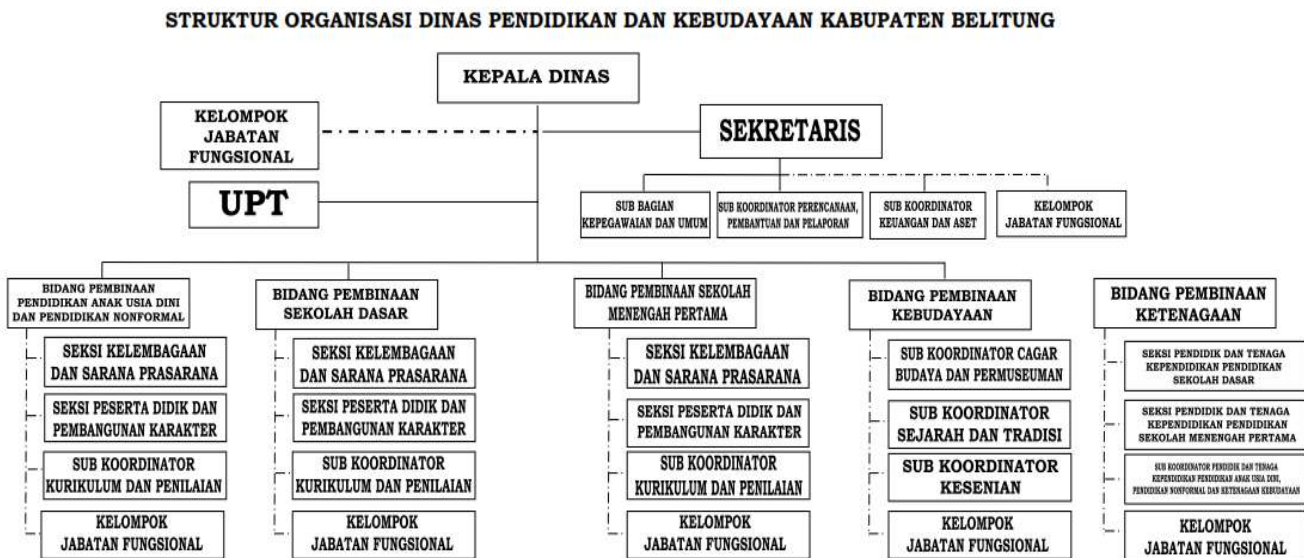
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;



- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabarkan pada struktur organisasi berikut.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Struktur Organisasi diatas, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat satu Sekretariat dan Lima Bidang Teknis yang memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Sekretariat yang melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;



- d. pengelolaan dan laporan keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- f. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, organisasi dan tatalaksana serta urusan Aparatur Sipil Negara;
- g. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan kebudayaan;
- h. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, yang melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bagi pejabat fungsional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di wilayah Kecamatan;



- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, yang melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bagi pejabat fungsional Pendidikan Dasar di wilayah Kecamatan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;



- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, yang melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;



- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan, yang melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian;
- d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- f. penyusunan bahan pembinaan komunitas yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
- g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
- h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam satu provinsi;
- k. penyusunan bahan pengelolaan museum daerah;
- l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan pembinaan kesenian;



- m. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian;
- n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, dan pembinaan kesenian.
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, yang melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- d. pelaksanaan pendataan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan Pendidikan nonformal dan ketenagaan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;



- h. pelaksanaan urusan usulan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- j. penyusunan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- k. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- l. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 64 orang yang terdiri dari 35 pegawai laki-laki (54,69%) dan 29 pegawai perempuan (45,31 %). Berdasarkan jenjang Pendidikan pegawai ASN dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Pendidikan Jenjang S1 dan S2 sejumlah 42 orang (65,63%), Pendidikan Jenjang Diploma 7 orang (10,94%) dan Pendidikan Jenjang SMA/Sederajat 15 orang (23,44%). Jumlah dan komposisi Pegawai ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1. Keadaan Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Ket
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	
2.	Sekretaris	1	-	
	1. Subbag Kepegawaian dan Umum	1	-	
	2. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	-	1	
	3. Fungsional Pengawas Sekolah	9	6	
	4. Fungsional Penilik	1	-	
	5. Fungsional Arsiparis	1	-	
	6. Fungsional Analis Kepegawaian	1	2	
	7. Fungsional Pustakawan	-	1	
	8. Fungsional Umum	5	6	
	9. PTT	7	2	
3.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	-	1	
	1. Seksi Kelembagaan dan Sarpras	1	-	
	2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	-	1	
	3. Fungsional Pengembang Kurikulum	-	1	
	4. Fungsional Umum	-	2	
4.	Kepala Bidang Pembinaan SD	1	-	
	1. Seksi Kelembagaan dan Sarpras	1	-	
	2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	1	-	
	3. Fungsional Pengembang Kurikulum	1	-	
	4. Fungsional Umum	2	1	
5.	Kepala Bidang Pembinaan SMP	1	-	
	1. Seksi Kelembagaan dan Sarpras	1	-	
	2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	-	1	
	3. Fungsional Pengembang Kurikulum	0	0	Belum Ada
	4. Fungsional Umum	1	2	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan	1	-	

	1. Fungsional Pamong Budaya	3	1	
	2. Fungsional Umum	0	0	Belum ada
7.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	1	-	
	1. Seksi PTK SD	1	-	
	2. Seksi PTK SMP	1	-	
	3. Fungsional Umum	-	1	
8	Kepala UPT Museum	1	-	
	1. Kasubbag TU	1	-	
	2. Fungsional Umum	1	-	
Jumlah		47	29	

- Keadaan Bulan April 2023

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan/Pangkat	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
Pembina Tk. I / IV b	8	4	12
Pembina / IV a	2	1	3
Penata Tk. I / III d	18	4	22
Penata / III c	2	3	5
Penata Muda Tk. I / III b	5	4	9
Penata Muda / III a	4	5	9
Pengatur Tk. I / II d	1	3	4
Pengatur / II c	1	1	2
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-	-
Pengatur Muda / II a	1		1
JUMLAH	42	25	67

- Kedaan Bulan April 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3. Keadaan Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S2	1	-	1
S1	33	16	49
Diploma III	1	3	4
Diploma II	1	-	1
SMA	6	6	12
Jumlah	42	25	67

- Kedaan Bulan April 2023

Tabel 2.4. Keadaan Pegawai PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan.

Jenis Diklat	Sudah Diklat		Belum Diklat		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Diklatpim Tk. II	1	0	0	0	1
Diklatpim Tk. III/ Administrator	3	0	3	1	7
Diklatpim Tk.IV/ Pengawas	5	1	7	2	15
Diklat PBJ	8	5	8	2	23
Jumlah	17	6	18	5	46

- Kedaan Bulan April 2023

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri dari Sarana yang langsung Mendukung Pelaksanaan Tugas Kantor serta Sarana yang berada dibawah pengelolaan/Koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Sarana yang ada di UPT Pendidikan dan Sekolah-sekolah. Sarana yang langsung mendukung pelaksanaan Tugas Kantor meliputi prasarana kantor berupa kendaraan, bangunan, perlengkapan kantor dan peralatan kantor yang mendukung pelaksanaan tugas kantor.

Adapun kondisi peralatan kerja yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung hingga saat ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5. Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis>Nama Barang	Satuan	Jumlah		
			Baik	Rusak	Total
1	Meja/Kursi Kerja	Unit	66	30	96
2	Meja/Kursi Rapat	Unit	286	48	334
3	Meja Resepsionis	Unit	1	-	1
4	Meja/Kursi Tamu	Set	5	3	8
5	Komputer				
	a. Personal Komputer	Unit	39	-	39
	b. Laptop/Notebook	Unit	15	5	20
6	Printer	Unit	39	2	41
7	LCD Proyektor	Unit	4	1	5
8	Perangkat jaringan Internet	Set	2	-	2
9	Perangkat Tele Conference	-	-	-	-
10	Telepon	Unit	1	-	1
11	Mesin Fax	Unit	1	2	3
12	Mesin Absensi	Unit	2	1	3
13	Televisi	Unit	2	2	4
14	Filling Kabinet	Unit	20	7	27
15	Lemari Arsip	Unit	22	3	25
16	Air Conditioner (AC)	Unit	25	5	30
17	Papan Pengumuman	Unit	10	-	10
18	Kendaraan Dinas				
	a. Mobil	Unit	5	-	5
	b. Motor	Unit	47	2	49

Sumber : Data Inventaris Dikbud 2023

Sarana dan Prasarana yang berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebar pada empat UPT Satuan Pendidikan dan UPT Museum, serta pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri. Jumlah Aset/Modal keseluruhan yang menjadi pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 2.6. Kondisi Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Nilai Aset
1	Tanah	4.620.187.500,00
2	Peralatan dan Mesin	20.857.462.221,00
3	Gedung & Bangunan	12.635.830.089,74
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	1.648.273.957,56
5	Aset Tetap Lainnya	14.382.096.948,00
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	676.523.000,00
	Jumlah	54.820.373.716,30

Sumber : Data Aset Dikbud 31 Desember 2022

2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah Satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Penarikan Retribusi Daerah berupa Jasa Usaha Untuk Objek Penyewaan Tanah dan Bangunan Gedung Nasional Tanjungpandan dan Retribusi Tempat Pariwisata UPT Museum Tanjungpandan. Kedua Objek Retribusi Usaha yang dikelola Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, sampai saat ini masih berjalan/operasional, walaupun secara persentase jumlah Retribusi yang berhasil ditarik tidak terlalu besar dibandingkan dengan Retribusi Daerah sektor lain. Penerimaan Retribusi jasa Usaha Penyewaan Tanah dan Gedung Nasional serta Retribusi Pariwisata UPT Museum Tanjungpandan sangat bergantung dari berapa banyak orang/pihak yang menyewa serta jumlah pengunjung yang masuk pada UPT Museum.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Perkembangan Target dan realisasi Pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir

No	Uraian	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.750.000	54.260.000	210,72	55.750.000	78.090.000	140,07	108.000.000	131.600.000	121,85
2	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	5.000.000	8.600.000	172	13.500.000	15.680.000	116,15	18.000.000	19.194.000	106,63
3	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	65.250.000	41.754.000	63,99	55.250.000	59.973.000	108,55	100.000.000	109.044.000	109,04
Jumlah		96.000.000	104.614.000	108,97	124.500.000	153.743.000	123,49	226.000.000	259.838.000	114,97

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Adapun jenis layanan pendidikan dan kebudayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan pendidikan yaitu perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Selain itu juga pemerintah harus memenuhi layanan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana untuk urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Pada dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung di bidang Urusan Pendidikan dan Kebudayaan beserta target serta indikator kinerjanya. Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tingkat

ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.8. Keadaan Siswa 3 (Tiga) tahun terakhir

Jenjang	Tahun		
	2020	2021	2022
PAUD	5.189	4.087	4.205
SD/MI	19.162	19.072	19.024
SMP/MTs	8.347	8.464	8.524
Kesetaraan	659	536	692
Jumlah	33.357	32.159	32.445

Tabel 2.9. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar
Tahun 2020

No	Kecamatan	Siswa Putus Sekolah			Jumlah Siswa			%		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Membalong	6	2	8	1.359	1.283	2.642	0,44	0,16	0,30
2.	Tanjungpandan	9	4	13	5.828	5.326	11.154	0,16	0,08	0,12
3.	Sijuk	7	1	8	1.677	1.534	3.211	0,42	0,06	0,25
4.	Badau	-	-	-	806	772	1.578	-	-	-
5.	Selat Nasik	-	-	-	304	273	577	-	-	-
Jumlah		22	7	29	9.974	9.188	19.162	0,22	0,08	0,15

Tabel 2.10. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar
Tahun 2021

No	Kecamatan	Siswa Putus Sekolah			Jumlah Siswa			%		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Membalong	4	2	6	1.283	1.272	2.555	0,31	0,16	0,23
2.	Tanjungpandan	15	7	22	5.804	5.383	11.187	0,26	0,13	0,20
3.	Sijuk	8	1	9	1.659	1.535	3.194	0,48	0,07	0,28
4.	Badau	-	-	-	810	783	1.593	-	-	-
5.	Selat Nasik	-	-	-	291	252	543	-	-	-
Jumlah		27	10	37	9.847	9.225	19.072	0,27	0,11	0,19



Tabel 2.11. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar
Tahun 2022

No	Kecamatan	Siswa Putus Sekolah			Jumlah Siswa			%		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Membalong	3	-	3	1.334	1.290	2.624	0,22	-	0,11
2.	Tanjungpandan	1	-	1	5.819	5.440	11.259	0,02	-	0,01
3.	Sijuk	2	3	5	1.570	1.494	3.064	0,13	0,20	0,16
4.	Badau	2	-	2	789	775	1.564	0,25	-	0,13
5.	Selat Nasik	2	-	2	269	244	513	0,74	-	0,39
Jumlah		10	3	13	9.781	9.243	19.024	0,10	0,03	0,19

Tabel 2.12. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah
Menengah Pertama Tahun 2020

No	Kecamatan	Siswa Putus Sekolah			Jumlah Siswa			%		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Membalong	2	1	3	503	517	1.020	0,40	0,19	0,29
2.	Tanjungpandan	9	3	12	2.396	2.519	4.915	0,38	0,12	0,24
3.	Sijuk	4	1	5	708	767	1.475	0,56	0,13	0,34
4.	Badau	2	2	4	327	344	671	0,61	0,58	0,60
5.	Selat Nasik	1	0	1	120	146	266	0,83	-	0,38
Jumlah		18	7	25	4.054	4.293	8.347	0,44	0,16	0,30

Tabel 2.13. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah
Menengah Pertama Tahun 2021

No	Kecamatan	Siswa Putus Sekolah			Jumlah Siswa			%		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Membalong	3	-	3	464	505	969	0,65	-	0,31
2.	Tanjungpandan	11	4	15	2.547	2.560	5.107	0,43	0,16	0,29
3.	Sijuk	4	4	8	740	751	1.491	0,54	0,53	0,54
4.	Badau	1	1	2	332	315	647	0,30	0,32	0,31
5.	Selat Nasik	-	-	-	113	137	250	-	-	-
Jumlah		19	9	28	4.211	4.253	8.464	0,45	0,21	0,33



Tabel 2.14. Perkembangan Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2022

No	Kecamatan	Siswa Putus Sekolah			Jumlah Siswa			%		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1.	Membalong	2	1	3	461	503	964	0,43	0,20	0,31
2.	Tanjungpandan	11	8	19	2.574	2.534	5.108	0,43	0,32	0,37
3.	Sijuk	11	3	14	733	783	1.516	1,50	0,38	0,92
4.	Badau	3	5	8	361	335	696	0,83	1,49	1,15
5.	Selat Nasik	2	-	2	116	124	240	1,72	-	0,83
Jumlah		29	17	46	4.245	4.279	8.524	0,68	0,40	0,54

Tabel 2.15. Keadaan Satuan Pendidikan Tahun 2022 per Kecamatan

No	Kecamatan	Jenjang						
		PAUD		SD/MI		SMP/MTs		Kesetaraan
		KB/TPA	TK	SD	MI	SMP	MTs	SKB/PKBM
1.	Tanjungpandan	24	29	45	1	15	2	2
2.	Sijuk	7	11	22	-	4	1	2
3.	Badau	6	4	17	-	3	-	1
4.	Membalong	8	7	30	1	5	-	1
5.	Selat Nasik	4	1	7	-	2	-	1
Jumlah		49	52	121	2	29	3	7

Tabel 2.16. Perkembangan Angka Melanjutkan 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Jenjang SD/SMP	
	Ke SMP/MTs (%)	Ke SMA/SMK (%)
2020	96,70	87,11
2021	93,84	89,05
2022	95,67	93,11



Tabel 2.17. Perkembangan Akreditasi Sekolah tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS AKREDITASI				JUMLAH	PERSENTASE TERAKREDITASI	KET
		TERAKREDITASI			BELUM			
		A	B	C				
1	PAUD	9	61	29	2	101	98,02	
2	SD/MI	13	102	7	1	123	99,19	
3	SMP/MTs	15	14	3	0	32	100,00	

Tabel 2.18 Data Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Guru			Kualifikasi S1/DIV			Persentase Kualifikasi S1/DIV		
		PAUD	SD	SMP	PAUD	SD	SMP	PAUD	SD	SMP
1.	Tanjungpandan	190	717	360	110	567	277	57,89	79,08	76,94
2.	Sijuk	64	243	102	42	194	81	65,63	79,84	79,41
3.	Badau	40	180	61	26	146	47	65,00	81,11	77,05
4.	Membalong	67	289	92	43	255	71	64,18	88,24	77,17
5.	Selat Nasik	18	65	31	7	50	20	38,89	76,92	64,52
Jumlah		379	1.494	646	228	1212	496	60,16	81,12	76,78

Tabel 2.19. Data Guru yang bersertifikat pendidik tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Guru			Bersertifikat Pendidik			Persentase bersertifikat Pendidik		
		PAUD	SD	SMP	PAUD	SD	SMP	PAUD	SD	SMP
1.	Tanjungpandan	190	717	360	12	267	119	6,32	37,24	33,06
2.	Sijuk	64	243	102	10	96	34	15,63	39,51	33,33
3.	Badau	40	180	61	6	85	24	15,00	47,22	39,34
4.	Membalong	67	289	92	11	118	23	16,42	40,83	25,00
5.	Selat Nasik	18	65	31	2	27	8	11,11	41,54	25,81
Jumlah		379	1.494	646	41	593	208	10,82	39,69	32,20



Tabel 2.20. Data Perkembangan Seni Budaya 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Jenis	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Seni Tari Tradisional	2 buah	2 buah	2 buah
2.	Seni Tari Kreasi baru	13 buah	13 buah	13 buah
3.	Seni Musik Diatonis	24 buah	24 buah	24 buah
4.	Seni Musik Pentatonis	-	-	4 buah
5.	Seni Rupa Lukis	-	-	-
6.	Seni Rupa Pahat	-	-	-
7.	Seni Theater Tradisional	1 buah	1 buah	1 buah
8.	Seni Theater Modern	-	-	-
9.	Group Kesenian	53 group	59 group	69 group
10.	Penyelenggaraan lomba/Festival	-	2 kali	2 kali

Tabel 2.21. Data Benda Cagar Budaya (BCB) dan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Belitung Tahun 2022

No.	Nama Objek	Fungsi Sekarang	Lokasi	Pemilik	Ket
1.	Jam Gede	Barata Dept. Store	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
2.	Eks Rumah Tuan Kuase	Wisma Bougenville	Tg.Pandan	Pemprov Babel	ODCB
3.	Hotel Pantai	Mess KJUB	Tg.Pandan	PT Timah	ODCB
4.	Museum Tg.Pandan	Museum Tg.Pandan	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
5.	Gereja Regina Pacis	Ruang Serbaguna	Tg.Pandan	Yayasan Regina Pacis	ODCB
6.	Eks Europeesche Kliniek	RSUD Kab. Belitung	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
7.	Eks Zusterhuis	Rumah Hj. Elis	Tg.Pandan	Hj. Elis	ODCB
8.	Eks Chineesche Hospital	SMK Pariwisata	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
9.	Rumah Type Kolonial	Rumdin Danlanud	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
10.	Rumah Type Kolonial	Rumdin Dandim 0414	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
11.	Eks Societeit	Hotel dan Club Biliton	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
12.	Rumah Kapiten Phang	-	Tg.Pandan	Ester Lena	ODCB
13.	Kelenteng Hok Tek Che	Kelenteng Hok Tek Che	Tg.Pandan	Yayasan Hok Tek Che	ODCB
14.	Kian Sien	SMK Yaperbel 1	Tg.Pandan	Yayasan Kian Sien	ODCB
15.	Holland Indisch School	SMPN 1 Tg.Pandan	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB



16.	Eks Gedung Landraad	Dinas Dikbud Belitung	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
17.	Eks Tuintdienst	PWRI Cab. Belitung	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
18.	Eks Kantor Asisten Residen	Dinas Dikbud Belitung	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
19.	Eks Rumah Asisten Residen	Kantor Kodim 0414	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
20.	Gedung Nasional	Gedung Nasional	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	BCB
21.	Eks Districthoofd	Rumdin Kapolres Belitung	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
22.	Benteng Kuehn	RTVS Dinamika	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
23.	Dockyard	Dok	Tg.Pandan	PT Timah	ODCB
24.	Kerkhoff	-	Tg.Pandan	Pemkab Belitung	ODCB
25.	Masjid Tua Sijuk	Masjid Al Ikhlas	Tg.Pandan	Yayasan Al Ikhlas	ODCB
26.	Kelenteng Sijuk	Kelenteng	Sijuk	Yayasan Hok Tek Che	ODCB
27.	Situs Mentikus	PT. AMA	Sijuk	Pemkab Belitung	ODCB
28.	Situs Padang Kellarin	-	Sijuk	Masyarakat	ODCB
29.	Situs Padang Pendam	-	Sijuk	Masyarakat	ODCB
30.	Mercusuar Pulau Lengkuas	Mercusuar	Sijuk	Ditjen Perhubungan Laut	ODCB
31.	Situs Gunung Lilangan	-	Badau	Keturunan Raja Badau	ODCB
32.	Situs Kota Tanah	-	Badau	Masyarakat	ODCB
33.	Situs Gunong Tajam	-	Badau	Masyarakat	ODCB
34.	Situs Parit Gunong	-	Badau	Masyarakat	ODCB
35.	Situs Aik Labu Kembiri	-	Membalong	Masyarakat	ODCB
36.	Situs Luday	-	Membalong	Masyarakat	ODCB
37.	Mercusuar Pulau Sumedang	Mercusuar	Membalong	Ditjen Perhubungan Laut	ODCB
38.	Mercusuar Tanjung Lancur	Mercusuar	Selat Nasik	Ditjen Perhubungan Laut	ODCB



Tabel 2.22 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama sekolah (RLs)	8,41	8,45	8,46	8,51	8,56	8,41	8,46	8,47	8,74	8,98	100,00	100,12	100,12	102,70	102,90
2	Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan	Persentase Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	0,30	0,28	0,24	0,20	0,18	0,13	0,15	0,19	0,07	0,18	43,33	53,57	79,16	35,00	100,00
3	Meningkatnya Mutu Layanan Manajemen Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru															
		- Guru Kelas SD	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,10	0,1	0,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- Guru mata pelajaran tingkat SD	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	0,19	0,18	0,18	0,18	0,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- Guru mata pelajaran tingkat SMP	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34	0,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya ekosistem kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan daerah	Persentase pemajuan kebudayaan Daerah	12	14	16	18	20	12	30,08	16,38	19,54	20,00	100,00	214,86	102,38	108,56	100,00



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
5	Meningkatnya ekosistem pemajuan kebudayaan	Persentase pemajuan kebudayaan Daerah	12	14	16	18	20	12	30,08	16,38	19,54	20,00	100,00	214,86	102,38	108,56	100,00
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD			100 %	100 %	100 %			98,49	97,92	98,10			98,49	97,92	98,10
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD			97,84 %	98,24 %	98,64 %			89,20	85,01	88,20			91,16	86,53	89,42
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP			100,00	100,00	100,00			93,68	97,42	94,53			93,68	97,42	94,53
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			82,89	83,29	83,69			77,66	61,83	64,01			93,69	74,23	76,48
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD			65,93	67,43	68,93			50,18	71,59	47,13			76,11	106,17	68,37
		Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi			66,67	83,33	100 %			37,50	42,86	42,86			56,24	51,43	42,86
		Persentase Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/DIV					89,03					88,19					99,06
		Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik					85,03					43,14					50,74



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)					Rasio (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
		Kebudayaan Daerah yang Terlestarikan			50,00	60,00	75,00			50 %	60	75			100,00	100,00	100,00
		Kesenian tradisional yang dilestarikan			40,00	50 ,00	60,00			40 %	50%	60,00			100,00	100,00	60,00
		Persentase Pembinaan Sejarah lokal					60,00					60,00					100,00
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan				30,00	30,00				30,00	30,00				100,00	100,00
		Jumlah Kunjungan Museum			1.100 orang	1.200 orang	1.300 orang			14.756 orang	30.429 orang	21.103 orang			1.341	2.535	1.623



**Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung Tahun 2021 – 2023**

No	Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2019-2023					Realisasi Anggaran 2019-2023					Rasio antara realiasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Realis asi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			170.728.381.566	182.034.337,420	178.066.360.431			166.730.714.797	163.263.345.794	166.019.799.876			97,66%	89,69	93,23		
2	Program Pengelolaan Pendidikan			75.633.558.825	55.062.172,435	76.098.202.526			70.086.244.883	50.978.415.400	71.538.646.283			92,67 %	92,58	94,01		
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					292.152.000					243.476.500					84,00		
4	Program Pengembangan Kebudayaan			1.130.116.740	1.054.786,360	1.067.718.838			791.972.825	1.477.354.995	997.288.640			70,08 %	140,06	93,40		
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional					195.000.000					n/a					n/a		
6	Program Pembinaan Sejarah					169.220.075					158.881.400					93,89		
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				219.620.000	317.764.253				318.330.929	301.959.525				144,95	95,03		
8	Program Pengelolaan Permuseuman			3.715.908.312	2.661.776,294	2.823.389.475			2.351.631.574	3.294.689.049	2.702.479.071			63,29 %	123,78	95,72		



Dari tabel diatas dalam pelayanan perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diukur dengan beberapa Indikator sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah, baik indikator kinerja Utama maupun indikator Kinerja Program dan Kegiatan. Dari beberapa indikator Kinerja yang ada terdapat indikator yang capaiannya melampaui target, serta beberapa indikator yang capaiannya rendah sebagaimana penjelasan berikut.

- Indikator kinerja urusan Pendidikan dan kebudayaan yang melampaui target didukung oleh optimalnya peran masing-masing bidang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain itu adanya penyesuaian target kinerja sewaktu perubahan Renstra sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan.
- Indikator kinerja yang capaiannya rendah disebabkan karena kewenangan yang terbatas, seperti akreditasi PKBM, yang mana pelaksanaan Akreditasi dilakukan oleh BAN, serta pengelolaan PKBM oleh masyarakat yang masih belum optimal.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan urusan pendidikan dan kebudayaan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

2.4.1. Tantangan

- 1) Masih ada warga kabupaten Belitung yang belum menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diukur dari capaian Rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 8,74 pada tahun 2022.
- 2) Belum semua warga masyarakat usia dini mengakses layanan pendidikan pendidikan anak usia dini yang diukur dari pencapaian angka partisipasi kasar PAUD pada tahun 2022 baru mencapai 71,59 %.



- 3) Masih terdapat anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar dilihat dari persentase angka putus sekolah pendidikan dasar tahun 2022 sebesar 0,07%.
- 4) Sebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata.
- 5) Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah dilihat dari Capaian kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa.
- 6) Masih terbatasnya Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD
- 7) Belum semua satuan PAUD terakreditasi minimal B.
- 8) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang kebudayaan.
- 9) Belum adanya Regulasi tentang Kebudayaan Daerah

2.4.2. Peluang

- 1) Komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan anggaran.
- 2) Adanya sistem Zonasi pada PPDB sehingga siswa tidak menumpuk di satu sekolah yang dianggap favorit.
- 3) Adanya sistem Pendataan terintegrasi (DAPODIK) sehingga memudahkan untuk memetakan kondisi satuan pendidikan.
- 4) Sebagian besar satuan pendidikan dasar telah terakreditasi minimal B.
- 5) Adanya aturan untuk akreditasi lembaga pendidikan non formal
- 6) Adanya pelajaran muatan lokal di satuan pendidikan untuk integrasi pengetahuan budaya daerah.
- 7) Adanya peningkatan minat dan apresiasi kaum muda terhadap seni budaya lokal daerah.
- 8) Banyaknya pagelaran seni budaya tingkat lokal, nasional dan internasional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Layanan perangkat daerah terkait urusan Pendidikan dan Kebudayaan memunculkan beberapa permasalahan pembangunan daerah, diantaranya:

1. Kualitas Pendidikan belum Optimal

Kualitas Pendidikan yang belum Optimal disebabkan antara lain keterbatasan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sebaran yang tidak merata, keterbatasan kemampuan guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran, sarana dan prasarana Pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta kemampuan Manajerial Kepala Sekolah yang belum merata.

2. Belum Optimalnya pemajuan Kebudayaan Daerah

Pemajuan Kebudayaan Daerah yang belum optimal penyebabnya antara lain, belum adanya regulasi Pemajuan Kebudayaan Daerah, Terbatasnya SDM di bidang Kebudayaan, belum maksimalnya penggalian tradisi dan adat istiadat serta sejarah lokal, belum optimalnya museum sebagai sumber belajar.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Pendidikan belum Optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	1. Persebaran pendidik belum proporsional 2. Keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan



			3. Keterbatasan sarana dan prasarana 4. Terbatasnya pemanfaatan Data Pendidikan
2.	Belum Optimalnya pemajuan Kebudayaan Daerah	Kurangnya Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan 2. Kurangnya daya Tarik objek kebudayaan 3. Kurangnya Apresiasi terhadap Pelaku Budaya 4. Kurangnya minat masyarakat dalam pengembangan kebudayaan 5. Peran pelaku budaya dalam pengembangan kebudayaan belum optimal 6. Belum adanya regulasi Pemajuan Kebudayaan

3.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Sesuai peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 -2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026 yang menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan urusan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu “Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”** dengan **sasaran RPD yaitu “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”** melalui **strategi “Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan”** dan **arah kebijakan (1) Pelestarian adat istiadat, cagar budaya dan kesenian daerah; (2) Optimalisasi pengelolaan museum daerah.**



Sedangkan dalam mencapai tujuan pembangunan urusan Pendidikan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”** dengan **sasaran RPD yaitu “Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat”** melalui **strategi “Meningkatkan akses pendidikan”** dan **arah kebijakan (1) Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah; (2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan; (3) Meningkatkan Penyelenggaraan PAUD; (4) Meningkatkan Akreditasi Sekolah (PAUD), SD,SMP dan Pendidikan Kesetaraan; (5) Meningkatkan Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan; (6) Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak; (7) Meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (8) Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi; (9) Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah.**

Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu:

a. Faktor penghambat

- Masih Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini;
- Belum Optimalnya Layanan Pendidikan Kesetaraan, terutama untuk warga belajar usia lebih dari 18 tahun;
- Masih ada lembaga PAUD yang belum mencapai Akreditasi minimal B;
- Belum Meratanya sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Capaian Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa masih rendah;
- Belum optimalnya Pemanfaatan data dan informasi Pendidikan dalam pengambilan kebijakan.



b. Faktor pendorong

- Adanya sistem data dan Informasi (DAPODIK) yang terintegrasi;
- Adanya Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat untuk semua jenjang pendidikan;
- Adanya Rapor Mutu Pendidikan untuk memetakan Satuan Pendidikan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Misi yang ditetapkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kemendikbud menetapkan beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung maka hasil analisis permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan sasaran jangka menengah Kemendikbud beserta factor penghambat dan pendorongnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Renstra Kemendikbud

No.	Sasaran Renstra Kemendikbud	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Belum meratanya layanan pendidikan yang bermutu	Kurangnya sarana parasarana pendukung	Komitmen bersama terhadap peningkatan layanan pendidikan yang bermutu
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang			
3.	Menguatnya karakter peserta didik	Kemerosotan akal dan budi pekerti siswa		
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	Masih belum optimalnya pelestarian bahasa dan kebudayaan		
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel			



3.3.2. Telaah Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung

Adapun tujuan dari rencana pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2017-2022 dirumuskan sebagai berikut.
Rumusan Tujuan

Tabel 3.3. Rumusan Tujuan

Misi	Rumusan Tujuan
Meningkatkan akses pendidikan	Peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus
Meningkatkan mutu pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus
Menyediakan tenaga kerja terampil jenjang pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal	Relevansi pendidikan Vokasi
Menyediakan dukungan layanan manajemen pendidikan	Penyediaan dukungan layanan manajemen pendidikan

Adapun tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menetapkan Tujuan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepan adalah **MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN BERBASIS BUDAYA LOKAL**. Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi, yaitu:

1. Meningkatnya peran serta budaya lokal dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata.
3. Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata.
4. Meningkatnya jumlah sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang berkualitas



Tabel 3.4. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Renstra PD Provinsi.

No.	Sasaran Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota	Masih rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini	Sebaran sekolah dan guru yang belum merata	Dukungan Anggaran APBD Kabupaten
2.	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	Masih terdapat siswa putus sekolah di semua jenjang	Angka putus sekolah dan angka melanjutkan	Dukungan anggaran APBD Kabupaten
3.	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Belum meratanya mutu pendidikan anak usia dini	Akses PAUD dan pendidikan masyarakat	Dukungan anggaran APBD Kabupaten
4.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	1. Masih terbatasnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional 2. Banyaknya cagar budaya yang terancam rusak dan kurang terpelihara	Dukungan anggaran	Dukungan pengembangan wisata berbasis seni budaya lokal



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRW Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung; dan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya. Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, dalam RTRW Kabupaten Belitung diatur mengenai penetapan kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.

Sebagai pengimplementasian RTRW Kabupaten Belitung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung wajib memperhatikan program dan kegiatan Pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan agar selaras dengan RPD Kabupaten Belitung 2024-2026 dan sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam RTRW. Hal ini bertujuan untuk pencapaian sasaran dan tujuan RPD.

Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang secara makro dengan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Belitung, maka faktor-faktor



penghambat dan pendorong fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung adalah:

a. Faktor Penghambat

- Minimnya pemahaman terhadap dokumen RTRW;
- Koordinasi lintas sektor kurang optimal;

b. Faktor Pendorong

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang RTRW;
- Instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan kesesuaian dokumen perencanaan dengan RTRW;

3.5. ISU STRATEGIS

Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Penduduk Usia Sekolah belum optimal.
2. Belum ada sekolah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) terutama standar sarana dan prasarana
3. Sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum merata.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran belum optimal.
5. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Pengelolaan pendidikan semua jenjang belum optimal
7. Masih rendahnya anggaran untuk peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN
8. Kurangnya SDM Kebudayaan
9. Kurangnya Pembinaan dan Apresiasi terhadap pelaku dan Lembaga kebudayaan
10. Belum Optimalnya Pemanfaatan Cagar Budaya dan Museum.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama Sekolah (Rls) Ket: berdasarkan rilis dari BPS	8,74 Th	8,78 Th	8,80 Th	8,82 Th
	Meningkatnya Mutu Layanan pendidikan	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan Rumusan: Rata-rata Capaian SPM Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	89,40%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah		Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah Rumusan: Jumlah Pemajuan kebudayaan tahun berjalan / jumlah seluruh objek pemajuan kebudayaan	30,08%	35,22 %	40,36 %	45,50 %



	Meningkatnya objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah Rumusan: $\frac{\text{Jumlah Pemajuan kebudayaan tahun berjalan}}{\text{jumlah seluruh objek pemajuan kebudayaan (389)}}$	30,08%	35,22 %	40,36 %	45,50 %
--	--	--	--------	---------	---------	---------

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sebagaimana terlampir

Tabel 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah



Sl. No.	Particulars	Amount	Amount	Amount
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut dijabarkan melalui arah kebijakan sebagai arah pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				
Sasaran RPD	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama Sekolah (RLs)	Meningkatnya Mutu Layanan pendidikan	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan	1. Meningkatkan akses pendidikan 2. Pemenuhan standar Nasional Pendidikan (SNP)	1. Meningkatkan pemerataan Pendidik dan tenaga Kependidikan 2. Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Meningkatkan kompetensi literasi dan Numerasi pada anak usia sekolah
Tujuan RPD	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi				
Sasaran RPD	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	Meningkatnya objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	1. Meningkatkan potensi budaya untuk pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan 2. Optimalisasi Pengelolaan Museum Daerah	1. Meningkatkan Jumlah dan Kompetensi SDM Kebudayaan 2. Pembinaan Pelaku Budaya Daerah 3. Menetapkan ketentuan pemajuan kebudayaan



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun 2024–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

A. Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. *Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan* sesuai ketentuan.

Definisi operasional: (Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan/jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan) x 100%

2. *Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah*

Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.

3. *Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah*

Definisi operasional: Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%



4. *Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur*

Definisi operasional: Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan) x 100%

B. Urusan Pendidikan

1. **Program Pengelolaan Pendidikan**, dengan indikator program yaitu:

1. *Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)*

Definisi operasional: Jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%;

2. *Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)*

Definisi operasional: Jumlah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 sampai 6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%;

3. *Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (APS)*

Definisi operasional: Jumlah warga negara usia 7 sampai dengan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah sedang belajar di satuan pendidikan kesetaraan dibagi dengan jumlah warga Negara usia 7 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah pada kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%;

2. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, dengan indikator program yaitu:

1. *Persentase Jumlah Guru yang memiliki sertifikat Pendidik*



Definisi operasional: Jumlah Guru Jenjang PAUD, SD dan SMP yang memiliki sertifikat Pendidik dibagi dengan jumlah Seluruh Guru Jenjang PAUD, SD dan SMP pada Tahun berjalan x 100%

C. Urusan Kebudayaan

1. **Program Pengembangan Kebudayaan**, dengan indikator program yaitu:
Persentase budaya daerah yang dikembangkan

Definisi operasional: Jumlah Budaya daerah yang dikembangkan pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh kebudayaan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%

2. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**, dengan indikator program yaitu: *Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan*

Definisi operasional: Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah seluruh kesenian tradisional pada kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%

3. **Program Pembinaan Sejarah**, dengan indikator program yaitu:

Jumlah Sejarah Lokal yang didokumentasikan

Definisi operasional: Jumlah Sejarah lokal yang didokumentasikan pada tahun berjalan.

4. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**, dengan indikator program yaitu: *Persentase Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan*

Definisi operasional: Jumlah Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dibagi Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak Benda yang terdaftar pada tahun berjalan.

5. **Program Pengelolaan Permuseuman**, dengan indikator program yaitu:
Persentase Pelajar yang mengunjungi Museum

Definisi operasional: Jumlah Pelajar yang mengunjungi Museum dibagi dengan Jumlah Kunjungan Museum pada tahun berjalan.



Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2026 terdiri dari sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota



5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pembinaan Sejarah
 - a. Kegiatan Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Permuseuman
 - a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Adapun rincian pendanaan dari Program, Kegiatan dan sub Kegiatan periode Renstra 2024-2026 disajikan pada tabel berikut.



Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Berdasarkan Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024

Sasaran	Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)																				
	Kode				Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	2024			2025			2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	target		Rp		
URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																					
URUSAN PENDIDIKAN																					
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat						Rata-rata lama Sekolah (Rls)	8,74 Th	8,78	Th	280.929.769.480	8,80	Th	288.885.162.564	8,82	Th	296.977.492.441,33			866.792.424.486		
Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan						Rata-rata Capaian SPM Pendidikan	89,40%	100,00	%	280.929.769.480	100,00	%	288.885.162.564,4	100,00	%	296.977.492.441,33			866.792.424.486		
	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						190.345.036.480,0				195.479.887.574,4				200.770.059,6	100,00	%	586.494.983.256,0
					1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100,00	%	186.002.072.215,0	100,00	%	191.582.134.381,5	100,00	%	197.329.598.413	100,00	%	197.329.598.413	100,00	%	574.913.805.009,34
					2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		62,00	%	235.000.000,0	65,00	%	242.050.000,0	70,00	%	249.311.500,0	70,00	%	249.311.500,0	70,00	%	726.361.500,00
					3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		100,00	%	1.684.321.000,0	100,00	%	1.734.850.630,0	100,00	%	1.786.896.149	100,00	%	1.786.896.149	100,00	%	5.206.067.778,90
					4. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100,00	%	2.323.643.265,0	100,00	%	1.920.852.563,0	100,00	%	1.404.253.140	100,00	%	1.404.253.140	100,00	%	5.648.748.967,79
					5. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100,00	100,00	%	186.002.072.215	100,00	%	191.582.134.381	100,00	%	197.329.598.413	100,00	%	197.329.598.413	100,00	%	574.913.805.000
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen Hasil perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	5	Dokumen	12.938.000	6	Dokumen	13.326.140	5	Dokumen	13.725.924	16	Dokumen	39.990.064	
						Hasil	Terpenuhiinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	100%	100%	%		100	%		100	%		100	%		
	1	01	01	3.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2	Dokumen	5.175.000	3	Dokumen	5.330.250	3	Dokumen	5.490.158	8	Dokumen	15.995.408
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3	Laporan	7.763.000	3	Laporan	7.995.890	3	Laporan	8.235.767	9	Laporan	23.994.657
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	4	Dokumen	185.989.134.215	4	Dokumen	191.568.808.241	4	Dokumen	197.315.872.489	12	Dokumen	574.873.814.940	
						Hasil	Terpenuhiinya dokumen keuangan sesuai peraturan	100%	100%	%		100	%		100	%		100	%		
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.451 Orang/bulan	1.545	Orang/ bulan	185.975.371.215	1.545	Orang/ bulan	191.554.632.351	1.545	Orang/ bulan	197.301.271.322	4.635	orang/bulan	574.831.274.888
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1	Laporan	7.763.000	1	Laporan	7.995.890	1	Laporan	8.235.767	3	Laporan	23.994.657
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	2	Dokumen	6.000.000	2	Dokumen	6.180.000	2	Dokumen	6.365.400	6	dokumen	18.545.400
	1	01	01	3.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen Barang perangkat daerah	6 Dokumen	7	Dokumen	512.175.000	7	Dokumen	527.540.250	7	Dokumen	543.366.458	21	Dokumen	1.583.081.708	
						Hasil	Terpenuhiinya dokumen Barang sesuai peraturan	100%	100%	%		100	%		100	%		100	%		
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3	Dokumen	300.000.000	3	Dokumen	309.000.000	3	Dokumen	318.270.000	9	Dokumen	927.270.000
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3	Laporan	207.000.000	3	Laporan	213.210.000	3	Laporan	219.606.300	9	Laporan	639.816.300
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1	Laporan	5.175.000	1	Laporan	5.330.250	1	Laporan	5.490.158	3	Laporan	15.995.408



57

58

59

		1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	54,61	59,41%	%	550.000.000	69,41	%	566.500.000	79,41	%	583.495.000	79,41	%	1.699.995.000
		1	01	04	2.01	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Keluaran Rasio pengawas dan penilik PAUD	0	3,2	%	550.000.000	4,2	%	566.500.000	5,2	%	583.495.000	5,2	%	1.699.995.000
							Hasil Tercapainya Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	n/a	100%	%		100	%		100	%		100	%	
		1	01	04	2.01	0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	n/a	1	Dokumen	400.000.000	1	Dokumen	412.000.000	1	Dokumen	424.360.000	3	Dokumen	1.236.360.000
		1	01	04	2.01	0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Keluaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	n/a	1	Laporan	150.000.000	1	Laporan	154.500.000	1	Laporan	159.135.000	3	Laporan	463.635.000
URUSAN KEBUDAYAAN																				
Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah							Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	30,08%	35,22	%	7.335.414.000	40,36	%	7.555.476.420	45,50	%	7.782.140.713			22.673.031.133
	Meningkatnya objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan						Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	30,08%	35,22	%	7.335.414.000	40,36	%	7.555.476.420	45,50	%	7.782.140.713			22.673.031.133
		2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	n/a	25	%	1.338.652.000	54	%	1.378.811.560	60	%	1.420.175.907	100	%	4.137.639.467
		2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	n/a	6	OPK	475.000.000	6	OPK	489.250.000	6	OPK	503.927.500	6	OPK	1.468.177.500
							Hasil Terlaksananya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai target	n/a	100%	%		100	%		100	%		100	%	
		2	22	02	2.01	0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Keluaran Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 objek	6	Objek	425.000.000	6	Objek	437.750.000	6	Objek	450.882.500	18	Objek	1.313.632.500
		2	22	02	2.01	0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Keluaran Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	n/a	50	Orang	50.000.000	50	Orang	51.500.000	50	Orang	53.045.000	150	Orang	154.545.000
		2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Kesenian tradisional yang dilestarikan	n/a	40	%	105.000.000	50	%	108.150.000	60	%	111.394.500	60	%	324.544.500
							Hasil Terlaksananya Kesenian Tradisional sesuai target	n/a	100%	%		100	%		100	%		100	%	
		2	22	02	2.02	0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Keluaran Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	n/a	6	Objek	75.000.000	6	Objek	77.250.000	6	Objek	79.567.500	18	Objek	231.817.500
		2	22	02	2.02	0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Keluaran Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	3 sertifikat	10	Sertifikat	30.000.000	10	Sertifikat	30.900.000	10	Sertifikat	31.827.000	30	Sertifikat	92.727.000
		2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang penguatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Lembaga adat yang terbina	1 lembaga	1	Lembaga	758.652.000	1	Lembaga	781.411.560	1	Lembaga	804.853.907	1	Lembaga	2.344.917.467
							Hasil Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat	n/a	100%	%		100	%		100	%		100	%	
		2	22	02	2.03	0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Keluaran Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	n/a	1	Objek	98.820.000	1	Objek	101.784.000	1	Objek	104.838.138	3	Objek	305.442.738
		2	22	02	2.03	0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Keluaran Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	120 orang	120	Orang	659.832.000	120	Orang	679.626.960	120	Orang	700.015.769	360	Orang	2.039.474.729
		2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	n/a	50	%	195.000.000	60	%	200.850.000	70	%	206.875.500	75	%	602.725.500
		2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Pengelola sanggar seni tradisional yang dibina	n/a	50	Orang	195.000.000	50	Orang	200.850.000	50	Orang	206.875.500	150	Orang	602.725.500
							Hasil Terlaksananya Pembinaan Pengelola Sanggar Seni Tradisional sesuai target	n/a	100%	%		100	%		100	%		100	%	
		2	22	03	2.01	0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Keluaran Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	n/a	50	Orang	105.000.000	50	Orang	108.150.000	50	Orang	111.394.500	150	Orang	324.544.500
		2	22	03	2.01	0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Keluaran Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	n/a	5	Sertifikat	40.000.000	5	Sertifikat	41.200.000	5	Sertifikat	42.436.000	15	Sertifikat	123.636.000
		2	22	03	2.01	0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Keluaran Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	n/a	5	Lembaga	50.000.000	5	Lembaga	51.500.000	5	Lembaga	53.045.000	15	Lembaga	154.545.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Belitung sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
	Tujuan					
1.	Rata-rata lama Sekolah (RLs)	8,74 Thn	8,50 Th	8,51 Th	8,52 Th	8,52 Th
	Sasaran					
2.	Rata-rata Capaian SPM Pendidikan	89,40%	100%	100%	100%	100%
	Tujuan					
3.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	30,08 %	35,22%	40,36%	45,50%	45,50 %
	Sasaran					
4.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Daerah	30,08 %	35,22%	40,36%	45,50%	45,50 %



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung telah sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk memastikan pencapaian kinerja strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan selanjutnya sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan perangkat daerah.

Jika di kemudian hari terdapat penyesuaian kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap rencana strategis perangkat daerah maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungpandan, November 2024

KEPALA DINAS ,


Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196610011995121001

